

PEMETAAN PROFIL SOSIO-EKONOMI DAN KEBUTUHAN PENDAMPINGAN USAHA PESERTA KONSOLIDASI TANAH DI RW 008 DESA CLUMPRIT KELURAHAN DEGAYU

Afiyati Husna¹, Aistiya Nur Rokmah², Miqdad Daniel³, Panca Kurniati⁴, Nur Kholidah⁵

^{1,2,3,4} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

⁵Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

e-mail: afiyatihusna@gmail.com

Abstrak

Program konsolidasi tanah di wilayah pesisir Kota Pekalongan telah memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat di desa Clumprit. Namun kerentanan kondisi ekonomi masyarakat pasca bencana banjir rob masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan profil sosio-ekonomi masyarakat, mengukur struktur pendapatan, serta mengidentifikasi kebutuhan pendampingan usaha bagi warga peserta konsolidasi tanah di desa Clumprit Kelurahan Degayu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis pendataan kuesioner secara langsung terhadap 120 responden. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden adalah perempuan (57,5%) dan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian pada sektor jasa dan buruh harian (55,8%) dengan pendapatan masyarakatnya yang berada pada kisaran Rp 1.700.000 per bulan. Kendala utama yang dihadapi mayoritas responden adalah keterbatasan dalam pesanan (sanggan buruh jahit, buruh tani, buruh anak buah kapal, dan buruh kuli), keterbatasan modal materiil dan nonmateriil, dan keterbatasan kesadaran minat masyarakat dalam partisipasi kelembagaan. Rekomendasi pemberdayaan masyarakat di RW 008 desa Clumprit Kelurahan Degayu ini dapat difokuskan pada aspek penguatan kelompok usaha bersama, pelatihan keterampilan yang lebih bervariasi, dan penyertaan modal baik dalam bentuk materiil atau immateriil pasca konsolidasi tanah.

Kata kunci — Konsolidasi Tanah, Profil Sosio-Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, Akses Reforma Agraria, Desa Clumprit

1. PENDAHULUAN

Pesisir Kota Pekalongan khususnya Kelurahan degayu merupakan salah satu wilayah yang berada dalam Cengkraman ancaman ganda yang berupa krisis ekologis akibat banjir rob dan kerentanan Sosio-Ekonomi masyarakat yang kian meluas. langkah pemerintah meluncurkan program konsolidasi tanah pada tahun 2025-2026 ini sangat patut untuk diapresiasi sebagai upaya pemerintah dalam penataan ruang dan perlindungan hak atas tanah masyarakat di desa Clumprit. Kendati demikian, jaminan atas legalitas sertifikat pada dasarnya hanyalah satu sisi dari koin pembangunan yang mana tanpa disertai penataan akses yang mendasar pada akar masalah ekonomi, legalitas tanah tersebut beresiko menjadi aset pasif yang gagal meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Masalah mendasar pada mitra/warga RW 008 desa Clumprit terletak pada struktur mata pencaharian yang sangat bergantung pada sektor informal. Selain buruh harian batik dengan sistem sanggan, aktivitas ekonomi warga didominasi oleh nelayan tangkap, buruh pembuat kapal, pedagang kecil berbasis gerobak, serta peternak skala rumah tangga seperti ayam, bebek, dan merpati. Pola kerja ini membuat pendapatan warga sangat fluktuatif dan rentan terhadap perubahan musim maupun pesanan.

Meskipun genangan banjir rob di desa Clumprit telah surut, dampak krisis ekologis tersebut masih menyisakan kelumpuhan aktivitas ekonomi dan juga kondisi fisik desa Clumprit seperti jalan yang rusak. Banyak usaha mikro dan peternakan warga terhenti akibat kehabisan modal kerja pasca bencana. Di sisi lain, terdapat potensi ekonomi lokal berupa pengolahan buah mangrove menjadi sirup. Namun, usaha ini masih bersifat homemade dan produksinya sepenuhnya bergantung pada pesanan (by order), belum menjadi produksi massal yang stabil akibat keterbatasan modal, alat, dan akses pasar.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya partisipasi warga dalam kelembagaan lokal, sehingga program bantuan maupun pelatihan sulit terserap secara optimal. Oleh karena itu, warga RW 008 desa Clumprit sangat membutuhkan pendampingan usaha yang spesifik dan berbasis kebutuhan lokal. Seperti pembentukan kelompok usaha, bantuan permodalan, dan bantuan produktif lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan profil sosio ekonomi dan mengidentifikasi kebutuhan pendampingan usaha yang tepat sasaran bagi peserta Konsolidasi Tanah di RW 008 desa Clumprit, Kelurahan Degayu.

2. METODE

Jenis dan pendekatan penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis metode survei pemetaan sosial (*social mapping*). Pendekatan kuantitatif deskriptif bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan variabel sosio-ekonomi masyarakat secara sistematis, terukur, objektif, serta berbasis pada data numerik (Sugiyono, 2019). Sementara itu, pemetaan sosial (*social mapping*) digunakan sebagai proses sistematis untuk mendokumentasikan profil, potensi, dinamika kerentanan ekonomi, serta kebutuhan dasar masyarakat lokal (Suharto, 2014; Netting et al., 2017). Kombinasi kedua pendekatan ini dipilih agar mampu menghasilkan baseline data sosio-ekonomi yang presisi sebagai dasar perumusan rekomendasi penataan akses reforma agraria.

Lokasi dan Waktu Penelitian Pendataan lapangan dilaksanakan di desa Clumprit (RT 001-006 / RW 008), Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Pemilihan lokasi didasarkan pada penetapan wilayah tersebut sebagai salah satu kawasan yang mengikuti program Konsolidasi Tanah dan Penataan Akses Reforma Agraria di Kota Pekalongan. Rangkaian kegiatan yang mencakup perancangan instrumen, koordinasi mitra, pengumpulan data lapangan, hingga validasi dan analisis data berlangsung pada periode tahun 2026.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti program Konsolidasi Tanah yang ada di RW 8 desa Clumprit, Kelurahan Degayu. Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan teknik sensus (*total sampling*), di mana seluruh anggota populasi sebanyak 120 responden dijadikan subjek pendataan tanpa penarikan sampel acak (Arikunto, 2013).

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur yang mencakup demografi, jumlah tanggungan, struktur usaha, tingkat pendapatan, kendala usaha, hingga harapan warga terkait bentuk pendampingan. Guna menjaga keabsahan data, instrumen survei diverifikasi melalui kroscek (*triangulasi*) dengan tokoh masyarakat setempat.

Data diolah menggunakan bantuan perangkat lunak Python (library Pandas). Tahapan analisis meliputi analisis distribusi frekuensi untuk memetakan persentase demografi dan sektor mata pencaharian, analisis statistik deskriptif (mean, median, standard deviation, nilai minimum, dan maksimum) pada variabel pendapatan serta jumlah tanggungan, dan kategorisasi kerentanan ekonomi untuk mengelompokkan rentang tingkat pendapatan bulanan responden..

Tabel 1. Pembagian Anggota Tim

Anggota Tim	Peran
BPN (3 orang)	Bertindak sebagai inisiator program dan fasilitator yang memberikan data tentang masyarakat yang mengikuti program konsolidasi tanah dan membekali serta mengajari para mahasiswa dalam melakukan pendataan
DPL (Dosen)	Bertugas sebagai pembimbing yang mendampingi mahasiswa dari masing masing universitas agar pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat Aspek Reforma Agraria (ARA) ini berjalan tetap sesuai dengan ketentuan Universitas masing masing
Ketua Pelaksana (Mahasiswa ITSNU)	Bertanggung jawab sebagai orang yang sering berinteraksi kepada masyarakat di desa clumprit untuk sekedar pengenalan atau menggali informasi tentang clumprit serta bertanggung jawab dalam melakukan pendataan di RT 1 dan RT 4 untuk diolah menjadi data yang diminta pihak BPN
Sekretaris (Mahasiswa ITSNU)	Bertanggung jawab sebagai orang yang menghubungi tokoh masyarakat untuk melakukan pertemuan agar program kerja bisa terlaksana dengan baik dan dia bertanggung jawab melakukan pendataan di RT 5 dan RT 6 untuk diolah menjadi data yang diminta pihak BPN
Bendahara (Mahasiswa ITSNU)	Bertanggung jawab sebagai pemegang keuangan untuk operasional dalam melaksanakan program kerja serta bertanggung jawab melakukan pendataan di RT 5 dan RT 6 untuk diolah menjadi data yang diminta pihak BPN
Anggota 1 (Mahasiswa ITSNU)	Bertanggung jawab sebagai sesi dokumentasi kelompok dan pengeditan serta bertanggung jawab di RT 1 dan RT 4 untuk diolah menjadi data yang diminta pihak BPN
Anggota 2 (Mahasiswa ITSNU)	Bertanggung jawab sebagai admin sosial media kelompok yang nantinya memperkenalkan tentang program program yang dijalankan kepada publik serta bertanggung jawab di RT 5 dan RT 6 untuk diolah menjadi data yang diminta pihak BPN
Anggota 3 (Mahasiswa ITSNU)	Bertanggung jawab sebagai admin sosial media kelompok yang nantinya memperkenalkan tentang program program yang dijalankan kepada publik serta bertanggung jawab di RT 1 dan RT 4 untuk diolah menjadi data yang diminta pihak BPN

Anggota 4 (Mahasiswa ITSNU)	Bertanggung jawab terhadap pendataan RT 5 dan RT 6 untuk diolah menjadi data yang diminta pihak BPN serta membantu mengurus sosial media kelompok
Anggota 5 (Mahasiswa UMPP)	Bertanggung jawab sebagai admin sosial media kelompok yang nantinya memperkenalkan tentang program program yang dijalankan kepada publik serta bertanggung jawab di RT 2 dan RT 3 untuk diolah menjadi data yang diminta pihak BPN
Anggota 6 (Mahasiswa UMPP)	Bertanggung jawab sebagai seksi dokumentasi dan pembuatan caption untuk di upload di sosial media serta bertanggung jawab terhadap pendataan di RT 2 dan RT 3 untuk diolah menjadi data yang diminta pihak BPN
Anggota 7 (Mahasiswa UMPP)	Bertanggung jawab sebagai editor poster-poster untuk di upload di sosial media serta bertanggung jawab terhadap pendataan di RT 2 dan RT 3 untuk diolah menjadi data yang diminta pihak BPN

Setiap unsur dalam pembagian peran tersebut bekerja secara sistematis dan berhubungan melalui alur pendampingan yang telah direncanakan. Pembagian tugas tim di atas menjadi penggerak utama dalam mengeksekusi rangkaian tahapan pendampingan masyarakat desa Clumprit, mulai dari penyiapan kapasitas kelembagaan hingga tercapainya kemandirian ekonomi setelah mengikuti program konsolidasi tanah. Kerangka kerja pelaksanaan pendampingan secara komprehensif disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Program

Berdasarkan Gambar 1, alur pelaksanaan program pendampingan dirancang melalui empat tahapan utama:

1. Input (model dasar dan persiapan), berfokus pada penguatan kelembagaan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB), pendataan potensi usaha warga, serta penyediaan modal awal.

2. Proses (Pelaksanaan dan pelatihan), meliputi pelaksanaan pelatihan diversifikasi keterampilan yang adaptif (pengolahan produk lokal dan kerajinan) serta pendampingan pembuatan sertifikasi usaha (NIB dan sertifikasi halal).
3. Adaptasi (Penyesuaian), mendorong penerapan model usaha yang menyesuaikan dengan potensi lingkungan sekitar, pembukaan jejaring pasar, serta pemanfaatan pemasaran digital.
4. Output (Hasil akhir), target akhir berupa terwujudnya kemandirian ekonomi, penguatan posisi masyarakat desa Clumprit, serta peningkatan pendapatan dan kondisi ekonomi masyarakat setelah program konsolidasi tanah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pendataan terhadap 120 peserta konsolidasi tanah di RW 008 desa Clumprit, Kelurahan Degayu, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang beragam, dengan sebagian besar penduduk menggantungkan penghidupan pada pekerjaan sektor informal dan pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Jenis pekerjaan yang ditemukan antara lain buruh jahit, buruh batik, buruh sablon, buruh bangunan, buruh kapal, nelayan, peternak, pelaku usaha mikro dan kecil, pedagang, serta sebagian kecil masyarakat yang bekerja sebagai wirausaha dan pegawai.

Komposisi pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa sumber penghidupan masyarakat masih banyak bergantung pada pekerjaan yang bersifat informal dan memiliki tingkat kepastian pendapatan yang relatif rendah. Sebagian masyarakat memperoleh penghasilan berdasarkan jumlah pesanan, jumlah hari kerja, hasil tangkapan, atau kondisi pasar. Dengan demikian, keberlangsungan pendapatan rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam bekerja, tetapi juga oleh kondisi ekonomi dan permintaan pasar.

Kondisi tersebut terlihat dari distribusi pendapatan masyarakat. Dari 120 peserta yang didata,

Tabel 2. Pendapatan Masyarakat Desa Clumprit Degayu RW 008

Rentang pendapatan	Jumlah
RP 500.000 - Rp 1.000.000	25
Rp 1.000.001 - Rp 2.000.000	36
Rp 2.000.001 - Rp 3.000.000	31
Rp 3.000.001 - Rp 5.000.000	5

Rp 5.000.001 - Rp 10.000.000	3
tidak berpenghasilan	20
Jumlah	120

Sumber: Data yang diolah, 2026

Hasil pendataan masyarakat Desa Clumprit

Dari data di atas pendapatan masyarakat di desa Clumprit pada rata-rata menyentuh angka Rp 1.7008.000 perbulannya, nominal tersebut sangat menggambarkan ketimpangan yang cukup tajam jika dibandingkan dengan upah minimum kota(UMK) kota Pekalongan. ketimpangan ini bukan sekedar angka statistik melainkan cerminan daripada kerentanan struktural yang dialami oleh 37,5% rumah tangga yang berpendapatan sangat rentan(Rp 1.000.000 Per bulan. dalam kacamata sosiologi ekonomi(Soekanto 2009) Besar beban tanggungan keluarga (3 hingga 4 jiwa per rumah tangga) Makin menghimpit daya tahan ekonomi masyarakat saat mereka menghadapi krisis berkepanjangan.

beberapa kendala utama yang dihadapi masyarakat, yaitu ketidakpastian pekerjaan atau pesanan, kenaikan harga bahan baku, pendapatan yang tidak menentu, penjualan yang sepi, keterbatasan modal, persaingan dengan pemasaran daring, serta kerusakan mesin atau peralatan usaha.

Dilihat dari mayoritas jenis mata pencaharian masyarakatnya adalah terkait dengan sektor informal. mayoritas masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai buruh harian akan menjadikan buruh pada posisi yang lemah, karena mereka sepenuhnya akan bergantung pada ketersediaan pesanan dan pasokan bahan baku dari pemilik modal. Sehingga pada saat kondisi perekonomian yang sangat tidak stabil saat ini ditambah dengan kondisi lingkungan pasca banjir rob masyarakat akan sangat terdampak kondisi ekonomi nya.

Ketidakpastian pesanan terutama dirasakan oleh masyarakat yang bekerja berdasarkan permintaan, seperti penjahit, pekerja sablon, dan pelaku usaha kecil. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan sulit dipastikan setiap bulan. Sementara itu, kenaikan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi dan dapat mengurangi keuntungan usaha. Keterbatasan modal juga membuat masyarakat kesulitan membeli bahan baku, memperbaiki peralatan, maupun meningkatkan kapasitas produksi. Persaingan pemasaran menjadi kendala lain, terutama bagi pelaku usaha yang masih mengandalkan pemasaran secara konvensional. Perubahan pola pemasaran menuju media daring menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan dan sarana yang

sesuai agar dapat mempertahankan jangkauan pasar. Yang mana menunjukkan bahwa permasalahan usaha masyarakat tidak hanya berkaitan dengan modal, tetapi juga dengan kapasitas, peralatan, dan akses pasar.

Untuk mengetahui bentuk dukungan yang dianggap paling dibutuhkan oleh masyarakat, peserta diberikan pilihan mengenai jenis pendampingan yang dapat diberikan melalui program. Terdapat sembilan bentuk pendampingan yang ditawarkan, yaitu:

1. Pembentukan kelompok dan/atau badan usaha
2. Peningkatan kapasitas dan keterampilan kelompok dan/atau badan usaha
3. Penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan
4. Diversifikasi usaha
5. Fasilitasi akses permodalan
6. Fasilitasi akses Pemasaran (*offtaker*)
7. Penguatan basis data dan informasi
8. Penyediaan infrastruktur pendukung
9. Bantuan Produktif lainnya

Kebanyakan warga memilih pembentukan kelompok dan/atau badan usaha (1), peningkatan kapasitas dan keterampilan (2), fasilitasi akses permodalan (5), serta bantuan produktif lainnya (9). Sebagian masyarakat juga memilih penyediaan infrastruktur pendukung (8). Pilihan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berupa tambahan modal, tetapi juga penguatan kapasitas dan sarana yang dapat mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi. Kebutuhan pembentukan kelompok dapat dikaitkan dengan kondisi usaha masyarakat yang sebagian besar masih berskala kecil dan berjalan secara individual, sedangkan kebutuhan peningkatan kapasitas berkaitan dengan kemampuan pengelolaan dan pengembangan usaha.

Tingginya pilihan terhadap akses permodalan sejalan dengan kendala yang ditemukan selama pendataan, seperti keterbatasan modal, kenaikan harga bahan baku, dan kerusakan peralatan usaha. Sementara itu, pilihan bantuan produktif menunjukkan adanya kebutuhan sarana yang lebih spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan masing-masing masyarakat. Adanya pilihan terhadap infrastruktur pendukung juga sejalan dengan kondisi lapangan berupa kerusakan jalan dan permasalahan genangan atau rob. Dengan demikian, hasil pemetaan menunjukkan bahwa pendampingan yang dibutuhkan masyarakat mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, akses modal, bantuan sarana produktif, serta dukungan

infrastruktur yang disesuaikan dengan kondisi dan jenis mata pencaharian masyarakat.

Pada kondisi ketidakstabilan ekonomi dan ekologis ini, program konsolidasi tanah yang dilaksanakan 2025-2026 telah berhasil memberikan kepastian legalitas hak atas tanah bagi masyarakat di desa clumprit. Namun, Kondisi di lapangan mempertegas argument Harsono(2008) bahwa legalitas sertipikat tidak semata otomatis langsung mengangkat kesejahteraan masyarakat tanpa adanya intervensi penataan akses yang terencana. hal ini sejalan dengan arah kebijakan BPN(2021) yang menekankan pentingnya pendampingan usaha pasca konsolidasi tanah.

Namun sayangnya potensi pemberdayaan masyarakat di desa Clumprit terkendala oleh rendahnya motivasi diri masyarakat untuk berpartisipasi dalam kelembagaan lokal(hanya 11,7% dari 120 responden yang aktif dalam kelembagaan). Minimnya wadah kolektif ini membuat berbagai program bantuan pemerintah sulit tersalurkan secara optimal. Oleh karena itu strategi penataan akses ke depannya harus difokuskan pada tiga langkah taktis, yaitu:

1. Aspek Penguatan Kelompok Usaha Bersama:

Langkah awal dan paling krusial dalam penataan akses adalah membangun kembali pondasi kelembagaan lokal. Mengingat partisipasi warga dalam wadah usaha kelompok saat ini baru mencapai 11,7%, intervensi pemerintah maupun lembaga pemberdaya tidak boleh lagi berjalan secara individualistic. Pembentukan dan pengaktifan KUB berfungsi sebagai *hub* (pusat konsolidasi) bagi buruh batik harian dan pedagang kecil. Melalui wadah kolektif ini, buruh yang selama ini posisi tawarnya sangat lemah dalam sistem *sanggan* dapat membangun kohesi sosial, menyatukan sumber daya, serta memiliki daya tawar yang lebih kuat di hadapan penyedia bahan baku maupun juragan. Kehadiran KUB yang solid juga menjadi syarat utama agar berbagai program bantuan penanggulangan dampak rob dapat terserap secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. Pelatihan Keterampilan Yang Lebih Bervariasi:

Menggantungkan pada satu sektor mata pencaharian seperti buruh batik lepas yang sangat bergantung pada fluktuasi pesanan menjadi penyebab utama tingginya angka kerentanan ekonomi warga. Oleh karena itu, program pendampingan perlu menghadirkan pelatihan keterampilan yang lebih bervariasi dan adaptif terhadap kondisi lingkungan pesisir. Diversifikasi keahlian ini mencakup pelatihan pengolahan hasil laut, kerajinan berbasis limbah industri/lokal, hingga

literasi digital untuk pemasaran *online*. Dengan memiliki alternatif mata pencaharian yang beragam, rumah tangga warga tidak langsung kehilangan seluruh sumber pendapatan ketika industri batik sedang lesu atau ketika tempat usaha fisik mereka lumpuh tergenang banjir rob.

3. Penyertaan Modal Baik Dalam Bentuk Materiil maupun Immateriil Pasca Konsolidasi Tanah:

Program legalitas tanah (asset reform) harus ditindaklanjuti dengan dukungan permodalan yang holistik guna mengaktifkan nilai ekonomi tanah tersebut. Penyertaan modal ini mencakup dua dimensi yang saling melengkapi:

- Modal Materiil: Berupa penyaluran modal kerja stimulan, bantuan alat produksi yang tahan benturan bencana (seperti etalase jualan panggung/portabel), hingga kemudahan akses kredit usaha rakyat (KUR) dengan jaminan sertifikat tanah yang telah diterbitkan.
- Modal Immateriil: Berupa pendampingan manajemen keuangan dasar, pelatihan pencatatan akuntansi sederhana untuk UMKM, fasilitasi legalitas izin usaha (NIB), serta penyambungan akses pasar (market-linking) agar produk warga tidak hanya bergantung pada pasar lokal yang sepi akibat genangan rob

Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat RW 008 juga berkaitan dengan kondisi lingkungan permukiman. Ditemukan beberapa ruas jalan yang rusak serta indikasi dampak rob, yang terlihat dari perbedaan elevasi dan sebagian rumah yang telah ditinggikan untuk mengurangi risiko genangan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam mendukung aktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, ditemukan masyarakat yang menggadaikan sertifikat rumah untuk memenuhi kebutuhan finansial. Temuan tersebut menunjukkan adanya tekanan ekonomi pada sebagian rumah tangga, terutama di tengah pendapatan yang relatif rendah dan tidak menentu. Kondisi ini memperkuat kebutuhan akan akses permodalan dan dukungan usaha yang lebih produktif.

Berdasarkan hasil pemetaan, program konsolidasi tanah di RW 008 dapat diarahkan tidak hanya pada penataan pertanahan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelompok usaha, peningkatan kapasitas, akses permodalan, bantuan sarana produktif, dan perbaikan infrastruktur pendukung. RW 008 dapat menjadi tahap awal untuk mengembangkan bentuk pemberdayaan yang sesuai sebelum diterapkan pada wilayah desa Clumprit secara lebih luas. Diharapkan

melalui program pemetaan aspek reforma agrarian pada Desa Clumprit Degayu RW 008 ini bisa membantu penyaluran bantuan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Cclumprit Degayu.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan program pemetaan sosial dan pendampingan pasca konsolidasi tanah di desa clumprit, Kelurahan degayu, sejarah faktual berhasil menyelesaikan tahap dasar berupa kepastian legalitas tanah(asset reform) dan penyediaan data profil sosio-ekonomi masyarakat. Kendati demikian, ketahanan ekonomi masyarakat peserta program ini masih tergolong sangat rentan. hal ini ditunjukkan oleh rata-rata pendapatan masyarakat yang hanya sebesar Rp 1.700.000 perbulannya, yang mana Itu di bawah UMK Kota Pekalongan. Bahkan 37% diantaranya berada pada tingkat kerentanan ekstrem Yakni dengan pendapatan di bawah Rp 1.000.000 perbulan akibat ketergantungan masyarakat pada sektor informal seperti buruh jahit batik dan usaha kecil lainnya.

ditinjau dari evaluasi ketercapaian program pendampingan, kegiatan pemetaan dasar dan pendataan 120 responden ini berhasil direalisasikan secara penuh. namun pencapaian target pada pilar penataan akses(access reform) khususnya pembentukan kelembagaan kelompok usaha bersama, pelatihan diversifikasi usaha, dan fasilitas akses permodalan yang belum dapat terealisasi secara maksimal. hambatan utama belum optimalnya ketercapaian target tersebut dikarenakan oleh minimnya partisipasi masyarakat dalam kelembagaan lokal, keterbatasan modal kerja, serta kondisi pasca banjir rob yang masih memberikan dampak bagi masyarakat sekitar.

5. SARAN

Berdasarkan hasil pemetaan sosial dan evaluasi ketercapaian program yang belum sepenuhnya maksimal, disarankan agar Pemerintah Daerah Kota Pekalongan bersama Kantor Pertanahan setempat dapat memperkuat komitmen keberlanjutan program penataan akses (access reform) pasca-Konsolidasi Tanah. Pemerintah perlu mengawal proses penguatan kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) secara bertahap serta memfasilitasi integrasi skema permodalan materiil dan legalitas usaha bagi UMKM lokal, mengingat keterbatasan modal dan infrastruktur usaha yang tergenang rob masih menjadi hambatan utama masyarakat desa Clumprit.

Bagi masyarakat setempat dan para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, peningkatan partisipasi aktif warga dalam wadah kelembagaan

lokal menjadi kunci utama agar berbagai intervensi pelatihan diversifikasi usaha dan bantuan sosial dapat terserap secara tepat sasaran. Keaktifan warga secara kolektif akan memperkuat posisi tawar buruh harian batik serta mempercepat proses pemulihan ekonomi kawasan terdampak bencana. Sementara itu, bagi akademisi dan tim pengabdian selanjutnya, disarankan untuk melanjutkan kegiatan pendampingan melalui model pengabdian berbasis siklus jangka panjang (*longitudinal action research*). Penelitian atau pengabdian lanjutan perlu berfokus pada pendampingan intensif bagi KUB pionir yang telah terbentuk serta melakukan evaluasi berkala terhadap dampak diversifikasi keterampilan terhadap peningkatan pendapatan riil masyarakat pesisir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekalongan serta Pemerintah Kelurahan Degayu yang telah memberikan izin dan dukungan data lapangan selama pelaksanaan penelitian pemetaan sosial ini.

REFERENSI

- Panduan KKN Tematik Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan Penanganan Akses Reforma Agraria 2026*. (2026). Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.
- Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2026*. (2026). Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 124. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37. Jakarta.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Marfai, M. A., & King, L. (2008). Coastal flood management in Semarang, Indonesia. *Environmental geology*, 55(7), 1507-1518.
- Wahyu Triatmo, et all (2025). KOTA PEKALONGAN DALAM ANGKA Pekalongan Municipality in Figures 2025. <https://pekalongankota.bps.go.id>